

**KINERJA APARAT KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BERAS  
MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN TANJUNG GADING KECAMATAN PASIR  
PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2016**

**Oleh :**

**Yuni Sri Wulandari**

Email : yunisriwulandari11@gmail.com

**Pembimbing : Drs. H. Ishak, M.Si**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 298293  
Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*The purpose of this study was to determine the performance of village officials in the implementation of the Poor Rice Program (Raskin) in Tanjung Gading Village, Pasir Penyu Subdistrict, Indragiri Hulu Regency in 2016 and to describe what factors influence the performance of the village officials in the implementation of the Poor Rice Program (Raskin) in Tanjung Gading Village Pasir Penyu Subdistrict, Indragiri Hulu Regency in 2016. To measure the performance of the village officials in the implementation of the Raskin program, three indicators were used, namely Effectiveness, Responsiveness and Accountability.*

*The research method used is descriptive qualitative. The data sources include primary data that is done through interviews to the source of data sought using purposive sampling techniques. In addition to primary data is also supported by secondary data obtained from documents and documentation relating to the research theme.*

*Based on the results of the study, it can be seen from the three focuses of this study that the performance of the Village Government in the Poor Rice Program (Raskin) is not yet optimal in Tanjung Gading Village, Pasir Penyu District, Indragiri Hulu Regency in 2016. Furthermore, factors affecting the performance of the Village officials in the implementation of the Raskin program other than internal factors and external factors.*

***Keyword: Effectiveness, Performance, Raskin Program***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kemiskinan telah lama menjadi masalah yang serius sejak sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997. Keberhasilan rezim baru membangun perekonomian Indonesia ternyata tetap menyisakan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Karena itu, persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini bukan lagi mengelola dampak dari krisis ekonomi tetapi, lebih pada bagaimana memberantas kemiskinan.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah dibidang: distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, dan Bantuan pangan. Selain itu, dalam melaksanakan penyelenggaraan pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Terkait dalam upaya Pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka salah satu langkah yang diambil Pemerintah yaitu menjalankan Program Beras Miskin (Raskin) ini.

Program Raskin merupakan sebuah Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster I berbasis Bantuan

Sosial Terpadu Berbasis Keluarga. Diterangkan dalam Dokumen Pedoman Umum Raskin tahun 2016 bahwa disediakan 15 kg beras bersubsidi bagi keluarga miskin dengan harga Rp. 1.600,-/kg dengan kualitas beras Medium, sesuai dengan Standart Nasional Indonesia (SNI) yang secara khusus kepada Perum Bulog diintruksikan untuk mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk, Penduduk Miskin Menurut Desa dan Kelurahan di Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016**

No	Desa/ Kelurahan	KK	KK Miskin
1	Pasir Keranji	353	86
2	Air Molek I	1856	72
3	Candirejo	1518	97
4	Air Molek II	534	85
5	Dusun Gading	221	102
6	Petalongan	135	79
7	Kembang Harum	540	81
8	Batu Gajah	712	78
9	Jati Rejo	403	65
10	Serumpun Jaya	275	58
<b>11</b>	<b>Tanjung Gading</b>	<b>752</b>	<b>157</b>
12	Sekar Mawar	1112	73
13	Tanah Merah	536	82
<b>Jumlah</b>		<b>8947</b>	<b>1115</b>

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018*

Tabel di atas merupakan jumlah keluarga yang termasuk dalam kategori miskin yang ada di wilayah Kecamatan Pasir Penyu. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada saat ini jumlah keluarga miskin di Kecamatan Pasir Penyu masih terhitung banyak yaitu 1115 KK. Sehingga perlu adanya program Raskin ini guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan terbebas dari kemiskinan. Dari data yang disebutkan diatas, diketahui bahwa dari 13 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Tanjung Gading merupakan

Kelurahan dengan jumlah Keluarga miskin dengan KK terbanyak.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Keluarga**  
**Penerima Manfaat (KPM) Program**  
**Raskin Menurut Desa/Kelurahan di**  
**Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten**  
**Indragiri Hulu tahun 2012-2017**

Desa/ Kelurahan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pasir Keranji	136	78	78	78	78	63
Air Molek I	84	72	72	72	72	63
Candirejo	75	66	66	66	66	60
Air Molek II	61	50	50	50	50	50
Dusun Gading	101	97	97	97	97	97
Petalongan	117	70	70	70	70	66
Kembang Harum	125	75	75	75	75	69
Batu Gajah	130	82	82	82	82	72
Jati Rejo	156	103	103	103	103	91
Serumpun Jaya	60	48	48	48	48	45
<b>Tanjung Gading</b>	<b>207</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>92</b>
Sekar Mawar	126	54	54	54	54	50
Tanah Merah	114	63	63	63	63	63
<b>Jumlah</b>	<b>1045</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>881</b>

*Sumber: Data Olahan Peneliti, 2018*

Tabel di atas merupakan jumlah keluarga miskin yang termasuk dalam daftar KPM yang ada di wilayah Kecamatan Pasir Penyu. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pada saat ini jumlah KPM di Kecamatan Pasir Penyu masih terhitung banyak. Dari data yang disebutkan diatas, diketahui bahwa dari 13 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Pasir Penyu, Kelurahan Tanjung Gading merupakan Kelurahan dengan jumlah KPM Raskin terbesar.

Kemudian, dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 hingga tahun 2017 telah terjadi dua kali penurunan jumlah KPM program Raskin di Kecamatan Pasir Penyu yaitu tahun 2013 dan tahun 2017. Dapat di lihat bahwa Kelurahan Tanjung Gading dengan KPM terbesar terlihat rawan akan *problem* atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan program

Raskin. Berikut dari hasil pengamatan awal beberapa fenomena yang membuat para KPM merasa tidak puas terhadap program Raskin, yaitu :

*Pertama*, penurunan jumlah KPM tidak lantas mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Gading ikut meningkat. Penurunan jumlah yang terjadi menyebabkan banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar lagi sebagai penerima. Hal itu menyebabkan banyak protes dari masyarakat yang ingin kembali terdaftar sebagai KPM.

Pada tahun 2012, keluarga penerima manfaat berjumlah 207 KK dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 menjadi 127 KK hingga tahun 2016. Kemudian kembali mengalami perubahan data pada tahun 2017 menjadi 92 KK. Berarti jika dihitung dari tahun 2012 hingga 2017 ada 115 KK yang tidak terdaftar sebagai KPM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan Kelurahan Tanjung Gading Aswani Destuti, diketahui bahwa pada tahun 2012 yang menjadi penerima manfaat bukan hanya masyarakat tidak mampu melainkan yang berprofesi Pegawai Negeri juga menjadi penerima dari program Raskin ini.

Pada tahun 2013 hingga tahun 2017, terjadi kembali perubahan data pada tahun 2013 menjadi 127 KK hingga tahun 2016, kemudian tahun 2017 berubah kembali menjadi 92 KK. Jika kembali dilihat tabel 1.2 diatas, maka hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah KK miskin yang menunjukkan ada 157 KK yang seharusnya menjadi calon penerima manfaat program Raskin. Namun dilapangan dari tahun 2013 hingga 2017 ada 30-65 KK yang tidak lagi terdaftar. Oleh karena itu banyak masyarakat yang melakukan protes kepada Kepala

Lingkungan selaku anggota pelaksana Raskin di lapangan.

Hasil wawancara dengan salah seorang KPM program Raskin Kelurahan Tanjung Gading Yasinem, yang merasa masih layak untuk menerima beras Raskin tersebut karena merupakan keluarga yang kurang mampu dan juga merupakan seorang *single parent*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lingkungan II Kelurahan Tanjung Gading, Robert selaku anggota pelaksana program, mengatakan bahwa beliau telah melakukan tugas untuk membagikan beras kepada masyarakat sudah sesuai dengan daftar penerima yang diberikan oleh pihak Kelurahan. Mengenai masalah masyarakat yang protes sambungnya, maka akan dirapatkan kembali dalam Musyawarah Kelurahan.

Untuk menyasati masalah tersebut, petugas lapangan atas kesepakatan bersama Lurah melakukan “Subsidi Silang” untuk masyarakat yang tidak lagi terdaftar sebagai KPM. Subsidi Silang dilakukan untuk membantu masyarakat yang tidak lagi terdaftar menjadi KPM program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading dengan cara mengurangi jumlah beras yang seharusnya diberikan kepada 92 orang dengan jumlah 15kg/KK dikurangi menjadi 5-10 Kg/KK.

Namun, berdasarkan wawancara kembali dengan Kepala Lingkungan II Robert, untuk jumlah penerima Subsidi Silang ini tidak ditentukan. Beliau memperbolehkan setiap masyarakat yang datang untuk membeli beras. Termasuk orang yang dianggap mampu dalam ekonominya. Karena beliau ingin memebrikan rasa adil kepada seluruh masyarakat Tanjung Gading

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan perubahan data yang terjadi dari tahun 2012-2017 justru menambah permasalahan baru yaitu tidak tepat sasaran penerima dan jumlah beras yang didapatkan masyarakat.

*Kedua*, pada tahun 2015 ditemukan kualitas 1.905 kg beras yang sampai di titik distribusi kualitasnya bisa dikatakan tidak layak konsumsi. Jika dilihat warnanya kuning kehitaman, berbatu, serta berbau pada saat sudah menjadi nasi.

Berdasarkan wawancara dengan anggota pelaksana, aparat kelurahan maupun kecamatan tidak pernah datang untuk mengawasi kualitas beras tersebut. Apapun kualitas yang didapat pada saat itu, maka itulah yang akan diberikan kepada masyarakat.

Pernyataan di atas di tambahkan dengan hasil wawancara bersama RT I LK II Helmi, menyatakan bahwa beliau menyayangkan atas kualitas beras Raskin yang diterima oleh masyarakatnya. Pasalnya beras Raskin yang seharusnya bisa menjadi andalan bagi masyarakatnya yang kurang mampu dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari malah kualitasnya kurang menjadi perhatian.

Kemudian diperjelas dengan hasil wawancara bersama Lurah Tanjung Gading Hendrianto yang menyatakan bahwa mobil pengangkut beras Raskin dari Bulog langsung menuju lokasi titik distribusi yang berada di kediaman Kepala Lingkungan II selaku anggota. Kemudian Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima diterima pihak Kelurahan pada saat pihak anggota menyerahkan uang yang nantinya akan di setorkan ke Bulog.

Dari semua pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memang

tidak ada pengawasan oleh Aparat Kelurahan maupun Kecamatan terkait dengan kualitas beras Raskin di Kelurahan Tanjung Gading. Padahal berdasarkan pernyataan Kepala Bulog Rengat Parningotan Panjaitan, jika ditemukan kualitas beras Raskin yang dinilai buruk dapat langsung melaporkan ke Bulog Rengat untuk kemudian diganti dengan beras dengan kualitas yang lebih baik.

Permasalahan tersebut mungkin disebabkan karena adanya struktur dan fungsi di dalam struktur organisasi program yang belum menjalankan tugas mereka secara optimal. Hal ini disebabkan karena permasalahan pada sumber daya itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Padahal struktur fungsi itu itulah yang sangat menentukan kinerja instansi yang bersangkutan. Sehingga akan berpengaruh pada kinerja aparat Kelurahan dalam pelaksanaan program Raskin. Maka berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Kinerja Aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016. Berdasarkan permasalahan yang ada tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Kinerja Aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016?

## **KERANGKA TEORITIS**

### **Efektivitas**

Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharakan.

Untuk mengukur efektivitas suatu program, ada beberapa indikator menurut Budiani (2009), menetapkan variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan

### **Kinerja**

Sedarmayanti (2009:50), menerjemahkan kata "*performance*" menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil/unjuk kerja/penampilan kerja. Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang).

Dwiyanto (1995:48) menggunakan beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja birokrasi politik, yaitu antara lain:

- a. Produktivitas

Menurut Shafritz dan Russel, produktivitas adalah hubungan antara input dengan output. Input yang diukur

seperti tenaga kerja, materi dan modal, sedangkan output berupa hasil kerja unit dan produk-produk pekerjaan dan pemberian pelayanan.

#### b. Responsivitas

Menurut Smith, responsivitas merupakan kemampuan untuk menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Responsivitas merupakan cara yang efisien untuk mengelola urusan lokal dan memberikan layanan lokal. Pemerintah dapat dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

#### c. Responsibilitas

Menurut Fredrich, responsibilitas merupakan konsep yang berkenaan dengan standar dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Organisasi publik dapat dikatakan bertanggung apabila pelakunya memiliki standar profesionalisme atau kompetensi yang tinggi.

#### d. Akuntabilitas

Menurut Hatry, akuntabilitas merupakan istilah yang diterapkan untuk mengukur apakah dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Akuntabilitas secara tidak langsung menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap publik.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis metode penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data

yang digunakan adalah data primer dan data sekunder terkait dengan program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin(Raskin)**

##### **1. Efektivitas**

Kefektifan program ini data dilihat pada variabel menurut Budiani, yaitu:

##### 1) Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran berkaitan dengan sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kelompok sasaran menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam mengukur efektivitas suatu program karena untuk mengetahui kesesuaian program-program yang telah dibuat oleh suatu lembaga kepada kelompok-kelompok sasaran. Dikaitkan dengan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan ketepatan sasaran pada pelaksanaan program Raskin Kelurahan Tanjung Gading belum tepat sasaran. Pemilihan sasaran ini dimana berdasarkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh kriteria BPS dalam menentukan dan melakukan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu. Berikut ini hasil perbandingan data KK miskin dengan daftar KPM yang didapat di lapangan:

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan Data KK Miskin dan**  
**Daftar Keluarga Penerima Manfaat**  
**Program Raskin di Kelurahan**  
**Tanjung Gading**  
**tahun 2016**

Data KK Miskin	Jumlah KPM
157	127

*Sumber: Olahan Data Peneliti, 2018*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian keluarga yang termasuk dalam daftar PPLS BPS masih ada yang tidak terdaftar sebagai KPM. Hal ini menunjukkan bahwa belum dilakukan verifikasi data penduduk oleh penyelenggara program ini sehingga belum bisa menjadikan program ini sesuai dengan apa yang ditetapkan sebelumnya. Koordinasi dalam pemilihan sasaran belum dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada permasalahan tersebut, sehingga program Raskin ini belum sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

## 2) Sosialisasi Program

Program Raskin ini dibuat oleh Pemerintah usat yaitu Kementrian bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pada Kabupaten Indragiri Hulu program ini di tangani oleh Bagian Perekonomian Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Telah dijelaskan bahwa peran penyelenggara program sangat penting, salah satunya adalah sosialisasi dari penyelenggara program kepada masyarakat terutama pelaksana program. Sehingga informasi tentang pelaksanaan program dapat tersampaikan dengan jelas. Informasi tentang program sangat penting untuk disampaikan kepada sasaran sehingga program akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Apabila teori dikaitkan dengan hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang maksimal. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa sosialisasi yang harusnya secara berkala dilakukan ternyata hanya pada saat awal pembentukan program ini dilakukan yaitu tahun 2012. Sosialisasi yang dilakukan juga tidak secara langsung disampaikan kepada masyarakat, namun hanya kepada tim pelaksana di Kelurahan dan nantinya pihak Kelurahan yang kembali akan mensosialisasikan informasi tentang program ini kepada masyarakat

Masyarakat Kelurahan Tanjung Gading mengetahui adanya program ini dari informasi RT/RW, selain itu informasi adanya program ini juga didapatkan dari masyarakat yang tinggal disekitar tempat tinggal Lurah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program sangat berpengaruh pada informasi tentang pelaksanaan program yang dijalankan. Menurut Budiani (2007:53) bahwa sosialisasi dilakukan agar kelompok sasaran mengetahui dengan jelas informasi tentang program. Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang diketahui bahwa sosialisasi sangat berpengaruh terhadap jalannya program, ketika sosialisasi untuk program tidak dijalankan secara berkala, maka hal ini menyebabkan informasi yang didapat kurang jelas yang mana terlihat pada permasalahan ketika KPM ingin melakukan pengaduan tidak tahu harus mengadu kepada siapa karena dari awal masyarakat tidak diberi pemahaman yang mendalam terkait pelaksanaan program Raskin ini.

### 3) Tujuan Program

Tujuan program ini berkaitan dengan sejauh mana hasil nyata program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari adanya program Raskin yaitu untuk mengurangi beban rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari dengan cara pemberian beras bersubsidi kepada masyarakat.

Dengan memberikan beras bersubsidi dengan harga tembus yang rendah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Diharapkan dapat mengurangi beban belanja yang biasanya butuh biaya yang besar untuk membeli beras namun dengan adanya program Raskin ini bisa membantu mengurangi.

Dengan digulirkannya program Raskin dari Pemerintah, masyarakat Kelurahan Tanjung Gading merasa terbantu karena pengeluaran sehari-hari berkurang. Masyarakat juga mengharapkan agar program-program bantuan seperti ini akan terus berlanjut sampai nanti angka kemiskinan bisa dihilangkan.

Program Raskin ini dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin, jika masyarakat miskin membeli beras berarti mereka mendapat kesejahteraan kebutuhan pangan pokok mereka terpenuhi. Mereka dapat membeli beras dengan harga yang terjangkau yaitu hanya Rp. 1.600,-/Kg di titik distribusi.

Selanjutnya, dengan adanya program Raskin ini tentunya pemerintah sebagai penyelenggara diharapkan adanya perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah

Penelitian dilapangan diketahui bahwa bantuan beras bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah dirasa sangat

bermanfaat oleh KPM, dimana sebelumnya mereka ada yang tidak bisa membeli beras dengan harga yang murah namun sekarang sudah bisa membantu kebutuhan pangannya untuk sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau.

Sebelumnya bahwa tujuan program berkaitan dengan sejauhmana hasil nyata program dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian dilapangan bahwa hasil nyata dari tujuan program untuk mengurangi beban rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari masih belum bisa dikatakan maksimal dikarenakan meskipun semua KPM bisa membeli beras dengan murah, namun hal ini tidak bisa secara menyeluruh bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Waktu pendistribusian Raskin yang dilakukan per caturwulan tentu menjadi wacana yang harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah untuk bisa diatasi kedepannya.

### 4) Pemantauan Program

Pemantauan program ini diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan setelah adanya program sebagai bentuk perhatian terhadap program. Apabila dikaitkan dengan hasil peneliti dilapangan bahwa pemantauan program ini belum bisa dikatakan baik, tidak adanya perhatian yang diberikan kepada KPM menimbulkan permasalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan tidak pernah dilakukan pemantauan atau evaluasi pelaksanaan program oleh tingkat Kabupaten maupun Kecamatan.

Penelitian dilapangan diketahui bahwa saat ini pemantauan diserahkan kepada Kabupaten dan Kecamatan, namun Kecamatan hanya melakukan pemantauan sekedar menerima laporan administrasi sudah diselesaikan atau tidak,

hal ini juga dikoordinasikan dengan Lurah dan Sekretaris Lurah, tidak melihat langsung bagaimana pelaksanaan pendistribusian beras Raskin secara langsung. Hal ini nantinya Kecamatan yang akan melaporkan kepada Kabupaten tentang pelaksanaan program di lapangan.

Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Kabupaten, Kecamatan dan aparat Kelurahan menjadikan pemantauan ini terhambat. Pemantauan tidak dilakukan sepenuhnya oleh penyelenggara program, setelah pendistribusian beras sampai ke Kelurahan, pihak Kabupaten dan Kecamatan sudah melepas tanggung jawab yang mana kemudian tanggungjawab diberikan kepada Lurah, namun tidak adanya koordinasi antara tiga pihak ini menjadikan pemantauan ini tidak dilaksanakan dengan baik.

## 2. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan untuk menyediakan sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat apabila kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi oleh para pembuat kebijakan dengan pengetahuan yang tepat dan dapat menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Dalam menjalankan suatu program maka aparat Pemerintah harus bersikap responsif dengan keadaan serta kondisi masyarakatnya di lapangan. Aparat Pemerintah harus terus berusaha yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Meskipun dalam penyelenggaraannya ada terdapat kendala, namun harus mampu mengatasinya dengan baik. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading seperti masalah pagu Raskin itu sendiri,

namun hal tersebut tidak mesti menjadi halangan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa selama menemukan kendala dalam pelaksanaan program Raskin, aparat Kelurahan beserta tim pengelola Raskin di Kelurahan Tanjung Gading mampu mengatasinya dengan baik. Salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat Kelurahan dan tim pelaksana Raskin di Kelurahan Tanjung Gading adalah seperti jumlah pagu yang ditetapkan oleh BPS masih ditemui yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui salah satu kendala yang dihadapi yaitu masalah pagu Raskin. Namun menurut pengamatan penulis ada hal lain yang menjadi kendala aparat Kelurahan dalam melaksanakan program Raskin ini yaitu kualitas beras yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pernyataan diatas dibenarkan oleh Lurah Tanjung Gading selaku penanggungjawab program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading.

Mengenai kualitas beras yang rendah, pernyataan Kepala Bulog Rengat Parningotan Panjaitan dalam sebuah artikel yaitu sebagai berikut:

*“Jika ditemukan kualitas beras Raskin yang dinilai buruk dapat langsung melaporkan ke Bulog Rengat untuk kemudian diganti dengan beras dengan kualitas yang lebih baik”***(Dikutip dari artikel online, pada tanggal 10 Februari 2018)**

Dari berbagai pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat responsivitas aparat Kelurahan Tanjung Gading akan kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan program Raskin ini sudah optimal diberikan kepada

masyarakat khususnya KPM program Raskin. Yaitu dengan melakukan subsidi silang dan melakukan pengaduan kepada Bulog mengenai kualitas beras yang rendah. Masyarakat sudah cukup puas dengan sikap responsif aparat Kelurahan dalam menjalankan program ini kepada masyarakat.

### 3. Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas sebenarnya memiliki makna yang hampir sama dengan prinsip Responsibilitas yaitu sama-sama bentuk pertanggungjawaban. Responsibilitas dan Akuntabilitas akan saling berhubungan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Akuntabilitas dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading ini bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan program Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Dalam program Raskin prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dalam hubungan antar pelaksanaan program, meliputi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu, Bulog Subdivre Rengat, Aparat Kecamatan Pasir Penyau dan Aparat Kelurahan.

Selain itu, prinsip akuntabilitas juga ditujukan kepada KPM Program Raskin, diantaranya dengan adanya rekap Berita Acara Serah Terima beras Raskin yang dibuat oleh para petugas di Kelurahan.

Selain itu, dalam sebuah artikel *online* dijelaskan bahwa:

*“Secara rutin ada pelaporan Bulog subdivre Rengat dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengenai PHB*

*Raskin, selain itu akan dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi koordinasi Raskin”.* (Dikutip dari artikel online, pada tanggal 18 Februari 2018)

Berdasarkan pernyataan tersebut pengelolaan program Raskin ini juga dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya laporan rutin dari Bulog dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mengenai laporan pelunasan pembayaran beras (PHB) dan rapat koordinasi maupun evaluasi tim koordinasi Raskin.

Pelaporan pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading dilakukan secara *bottom up*. Proses pelaporan dengan cara ini dilakukan oleh petugas di tingkat bawah untuk diberikan kepada petugas yang berada di atasnya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa proses pelaporan pelaksanaan program Raskin dimulai dari beberapa tahapan mulai tingkatan terendah yaitu Kelurahan hingga ketinggian tertinggi yaitu Kementrian.

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa memang secara rutin aparat Kelurahan melaporkan pelaksanaan program Raskin dengan menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan juga menyetorkan uang hasil penjualan beras yang akan disetorkan langsung kepada Bulog sebagai biaya operasional angkutan.

Namun kenyataannya dilapangan, prinsip akuntabilitas aparat Kelurahan kepada masyarakat masih kurang khususnya bagi keluarga penerima manfaat (KPM) program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading.

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa memang tidak ada campur tangan Kelurahan pada saat pendistribusian beras kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak pernah diberitahu kepada

masyarakat menegnai surat berita acara itu sendiri.

Dari semua pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa dapat diketahui prinsip akuntabilitas aparat Kelurahan kepada instansi lain terkait Raskin ini bisa dikatakan sudah cukup optimal dijalankan dengan secara rutin menyerahkan berita acara kepada tim Kecamatan. Namun, akuntabilitas aparat Kelurahan kepada KPM program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading masih belum optimal.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin(Raskin)**

Dalam mencapai kinerja terbaik, tentu ada faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016 adalah sebagai berikut:

#### **1. Internal**

Peneliti mendapatkan faktor-faktor inter yaitu faktor yang terjadi di dalam lingkungan kelurahan dan mempengaruhi Kinerja Aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016. Faktor-faktor internal tersebut meliputi:

##### **a) Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memberikan semangat kepada orang dan membujuk anggota organisasi agar bergerak menuju kearah yang diinginkan. Esensi kepemimpinan

ini pada dasarnya adalah untuk memberikan dorongan, semangat, arahan, serta dukungan kepada rekan satu timnya. Apabila ketua pelaksana terus memberikan arahan, masukan serta dorongan kepada tim bawahannya, maka semua tujuan serta sasaran dari program itu akan dengan mudah tercapai.

Di lapangan, hal itu belum tampak dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading yang seharusnya semangat, arahan, serta dukungan diberikan setiap kali dibutuhkan atau pada saat akan melaksanakan penyaluran beras Raskin yaitu per caturwulan. Namun nyatanya, hanya setiap setahun sekali dibahas dalam Musyawarah Kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan. Hal itu tentunya dapat mempengaruhi kinerja aparat Kelurahan dalam pelaksanaan program Raskin.

##### **b) Faktor Tim**

Selain faktor individual dan faktor kepemimpinan, faktor tim juga dapat mempengaruhi suatu kinerja. Dengan adanya kerja sama dan hubungan yang baik dengan rekan kerja maka pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Tanjung Tading dibentuk sebuah tim yang bertugas sebagai penyalur Raskin secara langsung kepada masyarakat. Dalam tim tersebut, Lurah sebagai Penanggung Jawab, Sekretaris Lurah sebagai Ketua, Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan sebagai Sekretaris serta ada tiga Kepala Lingkungan yang menjadi anggota.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, menunjukkan hubungan antar tim pada saat penyaluran Raskin belum kompak. Hal itu dapat dilihat pada saat

penyaluran Raskin di titik distribusi, hanya ada anggota yang bertugas. Seharusnya pada saat itu Lurah sebagai penanggung jawab, Ketua, serta Sekretaris pelaksana juga ikut serta dalam proses tersebut. Lurah bertanggung jawab untuk mengkaji apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, mengawasi jalannya proses jual-beli agar tidak terjadi penyelewengan. Selain itu, Ketua harusnya juga hadir untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta mengawasi kualitas beras. Selanjutnya kehadiran Sekretaris juga dibutuhkan untuk memastikan apakah harga jual beras di lapangan sesuai dengan ketentuannya dan tidak terjadi penyelewengan oleh anggotanya.

## **2. Eksternal**

Peneliti mendapatkan faktor-faktor eksternal yaitu yang terjadi di luar lingkungan kelurahan tanjung gading dan mempengaruhi Kinerja Aparat Kelurahan dalam Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016.

### **a) Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2016**

Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan untuk menjadi dasar acuan pelaksanaan program Raskin di tiap Desa/Kelurahan. Dengan adanya Peraturan Bupati ini maka tim pelaksana bisa mengetahui apa menjadi tugas dan fungsi dalam melaksanakan program.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sangat penting untuk berpedoman dalam Peraturan Bupati

Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan distribusi program Raskin. Tentunya dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati tersebut akan mempengaruhi kinerja aparat Kelurahan dalam pelaksanaan program Raskin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program Raskin di Kelurahan Tanjung Gading masih belum efektif. Selain itu kinerja aparat Kelurahan dalam pelaksanaan program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2016 juga masih belum optimal. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain dari faktor internal (faktor kepemimpinan, faktor tim) dan faktor eksternal (Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 71 Tahun 2016).

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu kinerja aparat Kelurahan dalam pelaksanaan program Beras Miskin (Raskin) masih belum optimal, maka dari itu diperlukan upaya-upaya untuk dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja sehingga pelaksanaan program di Kelurahan dapat berjalan baik. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diiharapkan kepada aparat Kelurahan Tanjung Gading dapat memperbaiki kinerja mengenai pelaksanaan program Raskin dengan lebih membangun

kekompakan antara tim, selain itu juga diharapkan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara langsung pada saat pembagian beras di TD. Dengan begitu, semua permasalahan di lapangan akan terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:Graha Ilmu
- B, Uno Hamzah. 2015. *Teori Kinerja Dan Pengukurannya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo
- Fahmi, Irham. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Hendriani, Susi & Yohanas Oemar. 2011. *Kinerja dan Kepuasan Kerja*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Upp Stim Ykp n
- Poltak Sinambela, Lijan. 2016. *Kinerja Pegawai Teori Pengukuran dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ratminto & Septi Winarsih, Atik. 2010. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sjofyan Arif, Miriam. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sugiono, 2009. *Memahami Penelitian*

- Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Grafindo Persada

### Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang *P a n g a n*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang *T i m K o o r d i n a s i*
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

### Skripsi

- Novaldy Destri, Tri. 2016. *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Begkalis Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Program Beras Miskin Untuk Masyarakat Miskin Otonom Di Kecamatan Bengkasli Tahun 2015)*: Universitas Riau
- Saputra, Noverdi. 2017. *Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016*. Pekanbaru: Universitas Riau
- Suhada, Lindra. 2018. *Respon Rumah Tangga Miskin Terhadap Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*: Universitas Riau

Ni Wayan Budiani. 2009. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruba Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Jurnal Ekonomi Dan Sosial. Vol 2. No 1*

### **Dokumen**

Pedoman Umum Raskin 2016

Profil Kelurahan Tanjung Gading tahun 2018

### **Sumber Lainnya**

<https://www.antarariauu.com/berita/32816/-12.224-rtsminhu-terima-raskin.html>

<http://weriau.com/mobile/detailberita/1707/regional/inhu/ditolak-warga-raskin-tak-layak-konsumsi-diganti-bulog-inhu>

<https://m.goriau.com/berita/indragiri-hulu/jumlah-penerima-takmengalamiperubahan-sebanyak-12224-rts-di-inhu-akan-terima-raskin-akhir-bulan-ini.html>